

**ANALISIS KUALITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL PADA PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Anggun Pratiwi Putri
NIM : 22 2013 208**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggun Pratiwi Putri

NIM : 22 2013 208

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang , Maret 2017



Anggun Pratiwi Putri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Anggun Pratiwi Putri
NIM : 22 2013 208
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal.....
Pembimbing



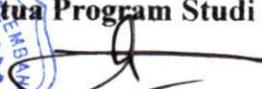
Mizan, S.E.,Ak.,M.Si.,CA

NIDN/NBM : 0206047101 / 859196

Mengetahui

Dekan

u.b Ketua Program Studi



Retri Sirajudin, S.E.,Ak.,M.Si.,CA

NIDN/NEM : 0216106902 / 944806



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ Ketika kamu meyakini semua usahamu untuk membahagiakan orang tuamu , Allah akan selalu kasih jalan.
- ❖ Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan tetapi tentang menghargai dan mensyukuri apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Mama tersayang Megawati Sinu
- ❖ Papa tersayang Kaharudin Kisum
- ❖ Adik-adik tersayang Dana Millando Putra dan Chanda Yulia Rahma
- ❖ Untuk yang tersayang Nopan Miharja
- ❖ Untuk yang tersayang Ela Anggeraini dan Putri Annisa Pratiwi
- ❖ Serta seluruh sahabat sahabatku.
- ❖ Terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar ku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu atas semangat dan doa nya.
- ❖ Terimakasih untuk teman seperjuangku CA.13.1 Dan terakhir untuk almamaterku



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Analisis Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.**

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat pembahasan dan bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak sekali pihak yang telah memberikan bantuan baik bentuk moril maupun materi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih terutama pada kedua orang tuaku tercinta papaku Kaharudin, mamaku Megawati serta adik-adikku yang selalu memberikan dukungan dan menjadi motivator utama dalam menjalani perkuliahan sampai saat ini dan selalu mendo'akan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk bapak Mizan, S.E.,M.Si., Ak.,CA selaku pembimbing saya yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta saran sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan seluruh jajaran Staf Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Fauzi Ridwan, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP beserta staf.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing akademik.
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dan Perangkat kerja yang telah memberikan data dan informasi yang saya butuhkan.
6. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT membalas budi baik seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca sebagai bahan referensi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, Februari 2017



Anggun Pratiwi Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
1. Anggaran	11
a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11

b. Pengertian Anggaran	11
c. Karakteristik Anggaran.....	12
d. Prinsip–Prinsip dalam Anggaran Sektor Publik	13
e. Jenis Anggaran.....	14
f. Kualitas Anggaran Publik.....	15
g. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik.....	19
2.Pendapatan	20
a. Kelompok Pendapatan Daerah	20
1) Pendapatan Asli Daerah	20
2) Pendapatan Transfer	20
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah	21
3.Belanja Daerah	22
a. Belanja Tidak Langsung	22
b. Belanja Langsung	24
4.Daerah Tertinggal.....	25
a. Pengertian Daerah Tertinggal	25
b. Faktor Penyebab Daerah Tertinggal	26
c. Program-Program Pembangunan.....	28
d. Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal	29
e. Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Tertinggal.....	30
B. Penelitian Sebelumnya	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34

B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Operasionalisasi Variabel.....	35
D. Data yang Diperlukan	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Sejarah Singkat.....	39
2. Visi dan Misi.....	40
3. Struktur Organisasi.....	41
4. Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab	42
5. Kualitas Anggaran dan Belanja Daerah	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
1. Transparan.....	55
2. Responsif.....	57
3. Efesien.....	58
4. Efektif.....	60
5. Akuntabel	62
6. Partisipatif	64
7. Terukur	65
8. Berkeadilan	67
9. Berwawasan Lingkungan.....	68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin.....	6
Tabel I.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan	8
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	36
Tabel IV.1 Opini BPK atas LKPD Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Selatan	56
Tabel IV.2 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Prioritas Pengurangan Keterisolasian Daerah Tahun 2011-2014	57
Tabel IV.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	59
Tabel IV.4 Perhitungan Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah	59
Tabel IV.5 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan	61
Tabel IV.6 Perhitungan Efektifitas Pendapatan dan Belanja Daerah.....	61
Tabel IV.7 Opini BPK atas LKPD Tahun 2011-2015 Provinsi Sumatera Selatan	63
Tabel IV.8 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	66
Tabel IV.9 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan	66
Tabel IV.10 Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.I Struktur Organisasi.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	75
Lampiran 2 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi.....	76
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara	77
Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	78
Lampiran 5 Surat Keterangan Riset dan Tempat Penelitian	79
Lampiran 6 Sertifikat TOEFL.....	80
Lampiran 7 Sertifikat KKN	81
Lampiran 8 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an.....	82
Lampiran 9 Biodata Penulis	83

ABSTRAK

Anggun Pratiwi Putri/22 2013 208/2017/ Analisis Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan /Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kualitas anggaran dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas anggaran dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan adalah kualitas anggaran dan belanja daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai kualitas anggaran dan belanja daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 9 (sembilan) prinsip masih ada 4 (empat) prinsip yang belum diterapkan secara optimal oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mewujudkan kualitas anggaran dan belanja daerah, yaitu prinsip responsif, , prinsip efektif, prinsip partisipatif dan prinsip berkeadilan.

Kata kunci : kualitas anggaran dan belanja daerah, percepatan pembangunan daerah tertinggal

ABSTRACT

Anggun Pratiwi Putri /22 2013 208/2017/The Analysis of The Budget Quality Revenue and Expenditure in Encouraging Regional Development Acceleration Lag of South Sumatera Provincial Government /Public Sector Accounting.

The Formulation of the research is how the budget quality and expenditure of South Sumatera Province in encouraging regional development acceleration left behind. The purpose of this research is to know the budget quality and expenditure of South Sumatera Province in encouraging regional development acceleration left behind. This method of research used descriptive research . Variable used is budget quality and the expenditure. The data used in this research are primary data and secondary data. The technique for collecting the data used interview and documentation technique. The method for analysis the data used a qualitative analysis. The technique for analysis of the research was descriptive analysis. The results of this research showed that about the budget quality and the expenditure of South Sumatera provincial government in encouraging regional development acceleration lag, then the conclusion that can be drawn from 9 (nine) the principle still have 4 (four) principle has not been applied optimally by the provincial government of South Sumatera in an effort to realize the budget quality and expenditure, namely the principles of responsive, , the principle of effective, participatory principle and the principle of fairness.

Keywords: budget quality and expenditure, regional development acceleration lag

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, hal itulah yang mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Menurut Mardiasmo (2004: 182) efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis

berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Terkait dengan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini masih ditemui beberapa permasalahan yang sering muncul di antaranya masih rendahnya kualitas perencanaan di daerah. Di samping itu, belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran di daerah juga masih merupakan permasalahan yang umum di setiap daerah. Kualitas belanja daerah dan APBD selama ini dianggap masih lemah dengan salah satu indikasi belanja tidak langsung selalu lebih besar dari belanja langsung.

Belanja dalam APBD dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan pendapatannya, serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik dalam jumlah yang mencukupi dan juga berkualitas. Dengan belanja yang berkualitas diharapkan APBD dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia setiap tahunnya harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan dan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Mardiasmo (2009: 62), anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, salah satunya menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta diharapkan mendorong percepatan pembangunan salah satunya percepatan pembangunan daerah tertinggal. Agar mencapai tujuan pembangunan, maka pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan harus direncanakan secara cermat mengingat terbatasnya sumber pendanaan daerah.

Pada umumnya pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu daerah. Namun, peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian, sehingga diperlukan efisiensi atas pengeluaran pemerintah. Efisiensi pengeluaran atau belanja pemerintah merupakan salah satu indikator dal

am konsep kualitas belanja. Salah satu struktur anggaran yang berkualitas adalah alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Menurut Lewis, dalam Badan Otonomi Daerah (2011) menyebutkan ada enam nilai pokok yang sama pentingnya dalam menilai kualitas anggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, efektifitas, keadilan, akuntabilitas, dan responsivitas sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, suatu anggaran dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Penyusunan anggaran yang dijalankan sesuai dengan beberapa prinsip dasar tersebut diharapkan mampu menciptakan suatu anggaran berkualitas. Anggaran daerah berperan penting dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Pencerminan kebutuhan masyarakat dalam anggaran daerah ditunjukkan melalui belanja daerah yang dikeluarkan. Terbatasnya kemampuan pendanaan daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif. Sebagaimana selalu terjadi dalam pengelolaan keuangan publik, selalu terjadi kendala penganggaran (*budget constraint*), yang mana banyaknya kebutuhan selalu dihadapkan pada keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, prioritas belanja dan perencanaan yang baik dapat menjadi kunci untuk menyiasati kendala penganggaran.

Terkait dengan hal tersebut, secara nasional kiranya perlu dilakukan analisis tentang kesehatan keuangan APBD yang mampu memberikan informasi yang berguna dalam memotret kondisi keuangan APBD baik dari sisi pendapatan,

belanja, maupun pembiayaan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 anggaran digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Dalam mencapai fungsi anggaran yang optimal diperlukan pemenuhan prinsip-prinsip anggaran secara konsisten. Otonomi daerah yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengadakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, belanja daerah dibagi dalam dua klasifikasi yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang telah dianggarkan.

Menurut Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (2005), daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memiliki tugas spesifik untuk mengentaskan 122 kabupaten dari kondisi ketertinggalan di seluruh Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, percepatan pembangunan dilakukan dengan memberi perhatian utama kepada daerah tertinggal dalam bidang ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas dan fiskal. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, keamanan, dan bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju.

Tabel I.1
Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Berdasarkan
Persentase Penduduk Miskin

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	OKU	12,28	11,58	11,19	12,31	11,96	13.22
2	OKI	15,98	15,06	14,53	15,82	15,30	17.08
3	Muara Enim	14,51	13,71	13,21	14,26	13,76	14.54
4	Lahat	19,03	17,92	17,45	18,61	18,02	18.02
5	Musi Rawas	19,38	18,25	17,67	17,85	17,28	15.13
6	Musi Banyuasin	20,06	18,99	18,29	18,02	17,38	18.35
7	Banyuasin	12,39	11,66	11,27	12,28	11,88	12.45
8	OKU Selatan	11,53	10,84	10,49	11,57	11,21	11.58
9	OKU Timur	9,81	9,23	8,98	10,28	10,13	11.24
10	Ogan Ilir	13,98	13,18	12,79	13,86	13,38	14.43
11	Empat Lawang	14,74	13,82	13,36	13,10	12,89	13.33
12	Palembang	15,00	14,13	13,59	13,36	12,93	12.85
13	Prabumulih	12,94	12,19	11,71	11,23	10,86	12.12
14	Pagar Alam	9,81	9,24	9,00	9,00	8,90	9.64
15	Lubuk Linggau	15,30	14,43	13,88	14,37	13,90	15.16
16	Penukal Abab Lematang Ilir	-	-	-	-	-	14.88
17	Musi Rawas Utara	-	-	-	-	-	19.73
Sumatera Selatan		14,80	13,95	13,48	14,06	13,62	14.25

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2015

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 131 tahun 2015, dari 122 kabupaten tertinggal diseluruh Indonesia, Sumatera Selatan masih memiliki 2 kabupaten tertinggal yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang

ditetapkan sebagai daerah tertinggal namun berpotensi untuk terentaskan dari daerah tertinggal. Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan relatif berdasarkan pada perhitungan enam kriteria dasar yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah. Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan prinsip pemerataan, keadilan, pemihakan, pemberdayaan, percepatan, kemitraan, dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk itu daerah tertinggal perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan berpedoman pada program nasional dalam penanganan daerah tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya pemerataan pembangunan yang diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di suatu daerah tertinggal.

Pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintah yang baik diantaranya prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta adil dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT).

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk tahun 2015 dan 2016 program percepatan pembangunan daerah tertinggal tidak menjadi program prioritas pembangunan daerah karena mengingat anggaran untuk tahun 2015 dan 2016

terbatas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Minimnya anggaran yang terealisasi membuat program pembangunan daerah tertinggal menjadi terhambat dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan daerah yang berkualitas juga harus dilakukan dengan prinsip adil dan merata sekalipun daerah tersebut sulit diakses dan dijangkau, namun pada kenyataannya kesenjangan wilayah, misalnya antara perkotaan dan pedesaan, dimana investasi ekonomi cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan sehingga daerah perkotaan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan pedesaan relatif tertinggal.

Tabel I.2
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2010	3.210.708.852.693	3.222.588.807.133	3.482.536.936.189	3.107.701.106.219
2011	3.788.678.701.400	3.963.984.966.161	4.106.682.479.981	3.860.079.835.012
2012	5.028.742.103.378	5.223.940.074.318	5.386.053.394.359	5.060.923.743.214
2013	6.000.782.738.000	5.468.139.691.033	6.221.526.149.006	5.678.703.610.531
2014	6.482.962.573.064	6.252.136.312.502	6.048.607.430.664	5.781.570.143.910
2015	6.883.873.903.633	5.990.424.062.511	5.609.583.728.080	4.497.889.160.889
2016	6.999.258.016.791	5.904.465.258.992	4.478.188.978.463	3.767.722.249.779

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, 2010-2016

Anggaran yang direalisasikan pemerintah belum digunakan secara merata dan optimal sehingga masih ada daerah tertinggal dan daerah yang kurang berkembang sampai saat ini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kualitas anggaran dan belanja daerah, target serta realisasi anggaran dan belanja daerah tersebut dapat digunakan sebagai acuan yang didukung dengan beberapa indikator kualitas anggaran dan belanja dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah kualitas anggaran dan belanja daerah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kualitas anggaran dan belanja daerah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat

menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan yang berharga bagi penulis dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada suatu instansi dan membuka wawasan penulis terhadap permasalahan dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat umum, agar lebih bijak dalam memahami setiap program pemerintah daerah dari masing-masing bidangnya dan dapat memberikan aspirasi yang baik sebagai evaluasi bagi pemerintah untuk kegiatan/program periode selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar memperhatikan kualitas anggaran dan belanja daerah. Baik dari pihak yang terlibat agar kualitas dalam pelaksanaan anggaran dapat tercapai.

4. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi tambahan untuk bidang studi yang sama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menambah ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra .(2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta :Erlangga.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .(2016). Laporan Realisasi APBD Tahun 2010-2015. Palembang. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (2017).Struktur Organisasi (Online) ([http://www.bappeda.sumselprov.go.id/# struktur organisasi](http://www.bappeda.sumselprov.go.id/#_struktur_organisasi), diakses 16 Januari 2017).
- Badan Pusat Statistik. (2015). Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin. Palembang. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. (2017). Opini BPK atas LKPD Tahun 2011-2015 Wilayah Sumatera Selatan. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Selatan.
- Carol W. Lewis, How to Read a Local Budget and Assess Government Performance dalam Anwar Shah (Ed.). (2007). *Local Budgeting (Public Sector Governance And Accaountability Series)*.The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.
- Direktorat Otonomi Daerah. (2011). Kajian Kualitas Belanja Anggaran dan Belanja Daerah (APBD). Jakarta: Direktorat Otonomi Daerah
- Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad Syam. (2014). *Akuntansi Keuangam Daerah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hanum, Zulia . (2011). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai . *Jurnal Manajemen & Bisnis Vol 11 No. 01 April 2011*, (<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/125/0>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2016).
- Nuryaman & Veronica Christina.(2015). *Metode Penelitian Akuntansi dan bisnis* . Bandung : Ghalia Indonesia .
- Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 tahun 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal* (2005). Jakarta. Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Mardiasmo.(2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Andi.

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2015). Jakarta. Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006). Jakarta. Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (2014). Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (2015). Jakarta. Presiden Republik Indonesia.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Sunyoto, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta. Refika Aditama.

Susetyo, Ivan budi, Domai, Prasetyo. (2014). Kualitas Anggaran dan Belanja Daerah Terhadap Penyediaan Pelayanan Masyarakat Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. *Jurnal Administrasi Publik Vol. 2, No. 3, Desember 2014 Hal. 511-517*, (<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/412/299>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2016).

Tamasoleng, Adelstin. (2013). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. (*Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*) (online) *Vol.3 ,No.1, 2015 Hal.97-110*, (ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jrbm/article/view/7522, diakses pada tanggal 18 November 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (2014). Jakarta. Presiden Republik Indonesia.